



LAPORAN KINERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2021



**LAPORAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021**

**Disusun :
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 telah tersusun sesuai dengan rencana. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas secara periodik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap unit kerja, satuan kerja dan kementerian/Lembaga sebagai entitas akuntabilitas untuk menyusun dan menyajikan laporan akuntabilitasnya secara berjenjang dan periodik. Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat penilai, pengendali dan pemacu kinerja setiap unit organisasi internal.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini memberikan gambaran capaian Kinerja yang diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021. Dengan demikian diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan feedback bagi internal organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit/satuan kerja dimasa yang akan datang.

Sidoarjo, Februari 2022
KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO



MOHAMAD EDI KURNIADI, ST.MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690605 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	v
Ikhtisar Eksekutif.....	1
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1. Perencanaan Strategis.....	23
2.2. Rencana Kerja Tahunan.....	24
2.3. Perjanjian Kinerja.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	27
3.2. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	34
3.4. Analisis Pencapaian Program dan kegiatan Pendukung.....	49
3.5. Laporan Realisasi Anggaran.....	55
3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	55
3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	56
BAB IV PENUTUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	14
Tabel 1.2 Sebaran PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 1.3 Sebaran PNS Berdasarkan Golongan	16
Tabel 1.4 Kondisi Tanah dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo	17
Tabel 1.5 Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas.....	18
Tabel 1.6 Kondisi Peralatan Kantor.....	19
Tabel 1.7 Isu Strategis.....	22
Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Sidoarjo	24
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Tujuan	24
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021.....	25
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi Dan UM.....	26
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi Dan UM.....	26
Tabel 3.1 Capaian IKU.....	29
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Menengah.....	29
Tabel 3.3 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	30
Tabel 3.4 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.....	32
Tabel 3.5 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah	34
Tabel 3.8 Evaluasi Dan Analisis Kerja.....	35
Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Tahunan.....	38
Tabel. 3.10 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	39
Tabel 3.11 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya perindikator	44
Tabel 3.12. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah	45
Tabel 3.15 Pengukuran keberhasilan Kinerja Jangka Menengah OPD	47

Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung	51
Tabel 3.17 Kegiatan	52
Tabel 3.18 Program Prioritas Bupati	53
Tabel 3.19 Program Prioritas Warung Rakyat Direnovasi	54
Tabel 3.20 20.000 UMKM Naik Kelas	54
Tabel 3.21 Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif	55
Tabel 3.22 Laporan Realisasi Anggaran	56
Tabel 3.23 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	56
Tabel 3.24 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	57

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo	7
Grafik 1.1 Persentase Tingkat Pendidikan	15
Grafik 1.2 Persentase PNS berdasarkan Golongan	16
Grafik 3.1 Pertumbuhan Koperasi berkualitas	30
Grafik 3.2 Pertumbuhan Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri	31
Grafik 3.3 Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	32
Grafik 3.4 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri	33
Grafik 3.5 Persentase Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas	34
Grafik 3.6 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri	35
Grafik 3.7 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka Menengah	39
Grafik 3.8 Persentase Koperasi yang Berkualitas	40
Grafik 3.9 Koperasi Aktif dan Tidak Aktif	41
Grafik 3.10 Koperasi Sehat	42
Grafik 3.11 Persentase Usaha Mikro yang mandiri.....	43
Grafik 3.12 Persentase Koperasi yang berkualitas	44
Grafik 3.13 Persentase Usaha Mikro yang Mandiri	45
Grafik 3.13 Perbandingan koperasi yang berkualitas antara capaian kinerja dengan target jangka menengah	46
Grafik 3.14 Perbandingan usaha mikro yang berkualitas antara capaian kinerja dengan target jangka menengah	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2021. Laporan ini memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, selain itu juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan sekaligus sebagai bentuk evaluasi diri terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun anggaran 2021 serta peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program/kegiatan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya akan menjadi input perbaikan dan penyempurnaan guna pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggambarkan reuiu dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2021 tanggal 28 Oktober 2021, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mengelola anggaran sebesar Rp.10.019.322.249,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp.9.897.681.093,00 dan belanja modal sebesar Rp. 121.641.156,00. Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp.5.752.870.217,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.4.144.810.876,00 sedangkan belanja modal digunakan untuk belanja modal Peralatan dan mesin sebesar Rp.121.641.156,00

Realisasi keuangan Anggaran sebesar 96,96% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 9.714.703.850,00 dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 13 (Tiga belas) kegiatan dan sampai

dengan akhir bulan Desember 2021 terealisasi fisik sebesar 100 %.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dapat dikategorikan cukup berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 10 (Sepuluh) indikator Program sebesar 100 % sesuai laporan E- Monev Dinas Koperasi tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021 dimana berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2021 disampaikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	Meningkatnya Aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro	Persentase Koperasi yang berkualitas	21,90%	21,90 %	100%	Berhasil
		Persentase Usaha Mikro yang mandiri	1,87%	1,87%	100%	Berhasil

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang mandiri	Persentase pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	1,60%	1,60	100%	
		Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri	0,25%	0,25%	100%	

KETERANGAN

NO	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90 %	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

Sehingga dari Tujuan dan Indikator sasaran pada tahun 2021 rata-rata realisasi kinerja mencapai 100% atau kategori berhasil.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Capaian indikator tujuan , sebanyak 1 Tujuan dengan 2 indikator, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Persentase pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	Berhasil
2.	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri	Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran sebanyak 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Persentase Koperasi yang berkualitas	Berhasil
2.	Persentase Usaha Mikro yang mandiri	Berhasil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

A. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun merupakan evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran untuk selanjutnya sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun selanjutnya

Sebagai salah satu komponen dari SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan demikian, Laporan Kinerja juga sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta menjadi media untuk mendapatkan

masukannya bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dimasa yang akan datang.

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada review rencana strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi, sedangkan tujuan dari pelaporan ini

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada Bupati Sidoarjo;
2. Sebagai salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Sebagai peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

1.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu organisasi Pemerintah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.09 Sidoarjo, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

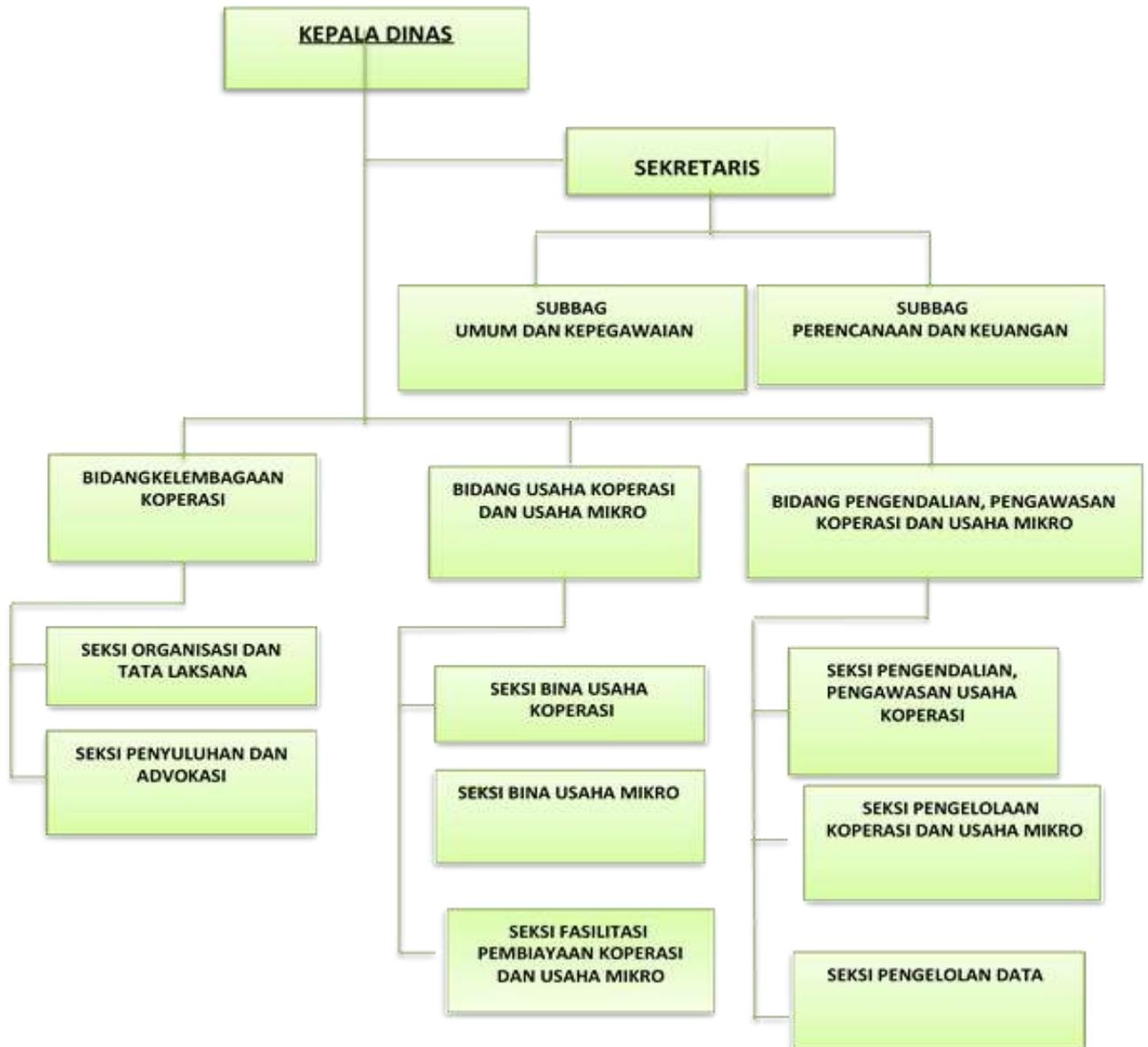
A. STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2016 menyebutkan bahwa

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:

- a) Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b) Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- c) Unsur Pelaksana, terdiri dari
 - 1. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari:
 - a) Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi
 - b) Seksi Bagian Penyuluhan dan Advokasi
 - 2. Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:
 - a) Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - b) Seksi Bina Usaha Mikro;
 - c) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - 3. Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi;
 - b) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Mikro;
 - c) Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dijelaskan sebagai berikut:

a) Kedudukan

- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
- Dinas Koperasi dan Usahan Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, dan usaha mikro, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

c) Fungsi

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan program bidang koperasi dan kesekretariatan;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas
- d) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut

a) Sekretariat

Sekretariat dikoordinir oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan, Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan
- b) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
- c) Pengelolaan administrasi keuangan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya

Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian, yaitu

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
- b. Melaksanakan pengelolaan barang
- c. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat
- d. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen dan perencanaan program
- b. Menyusun laporan dinas
- c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran
- d. Melaksanakan administrasi keuangan
- e. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b) Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang kelembagaan, untuk melaksanakan tugas, Bidang kelembagaan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis kelembagaan koperasi
- b) Pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi
- c) Pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Kelembagaan terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu:

1) **Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi** mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi, meliputi:
- c. Pelayanan izin pembentukan dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pembubaran koperasi serta Izin cabang pembantu dan kantor kas koperasi
- d. Pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana koperasi
- e. Penyusunan standarisasi pelayanan koperasi
- f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2) **Seksi Penyuluhan dan Advokasi Koperasi** mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan advokasi koperasi
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyuluhan dan advokasi koperasi meliputi:
- c. Penyusunan materi penyuluhan perkoperasian
- d. Pendidikan dan latihan perkoperasian
- e. Advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang perkoperasian

- f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penyuluhan dan advokasi koperasi
 - g. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- c) **Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang usaha koperasi dan usaha mikro, untuk melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan kebijakan teknis usaha Koperasi dan Usaha Mikro
 - b) Pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dan usaha mikro
 - c) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dan usaha mikro
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Usaha koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari 3 (Tiga) Seksi yaitu:

- 1) **Seksi Bina Usaha Koperasi** mempunyai tugas:
 - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha koperasi
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina usaha koperasi meliputi:
 - c) Penyusunan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi
 - d) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha koperasi (promosi, pameran, misi dagang, kerjasama antar koperasi, koperasi dengan badan usaha lain
 - e) Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi
 - f) Pendampingan usaha simpan pinjam koperasi yang kurang atau tidak sehat
 - g) Melaksanakan analisa dampak usaha koperasi
 - h) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina usaha koperasi
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
- 2) **Seksi Bina Usaha Mikro** mempunyai tugas :
 - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha mikro
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina usaha mikro

- c) Penyusunan pemberdayaan dan bimbingan usaha mikro
 - d) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha mikro (promosi, pameran, kerjasama antar usaha mikro, usaha mikro dengan badan usaha lain
 - e) Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
 - f) Melaksanakan diklat dan uji sertifikasi kewirausahaan
 - g) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina usaha mikro
 - h) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
- 3) **Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro** mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro
 - c) Fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro, jasa keuangan dan penjaminan kredit
 - d) Koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan
 - e) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
- d) **Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan usaha Mikro** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan usaha Mikro terdiri dari 3 (Tiga) Seksi yaitu:

1) **Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi** mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi, meliputi:
 - a) Bimbingan sistem pengendalian intern (SPI) koperasi
 - b) Teknis pengawasan dan audit koperasi
 - c) Monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan usaha koperasi
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

2) **Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Mikro** mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan usaha mikro
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan usaha mikro meliputi:
 - a) Bimbingan pelaksanaan administrasi yang baik bagi usaha mikro
 - b) Bimbingan pengawasan dan audit usaha mikro terkait pinjaman modal dari pemerintah
 - c) Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mikro hasil pembiayaan
- f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan usaha mikro
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3) **Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro** mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data koperasi dan usaha mikro
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan data koperasi dan usaha mikro meliputi akurasi data koperasi dan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, penguatan

- kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan data koperasi dan usaha mikro
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kabid sesuai dengan tugasnya.

1.3 ASPEK STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya.

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan modal penting dalam perkembangan organisasi pemerintah daerah kearah yang lebih baik. pembinaan kepada SDM atau aparatur di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem yang optimal dalam kinerja OPD. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan untuk peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan pelatihan yang ada. Total terdapat 42(Empat puluh dua) orang. Dari total tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) orang berjenis kelamin laki-laki, dan 21 (dua puluh satu) orang berjenis kelamin perempuan, keterangan tersebut akan ditampilkan pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1
Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Laki-Laki	21 Orang
2	Perempuan	21 Orang
TOTAL		42 Orang

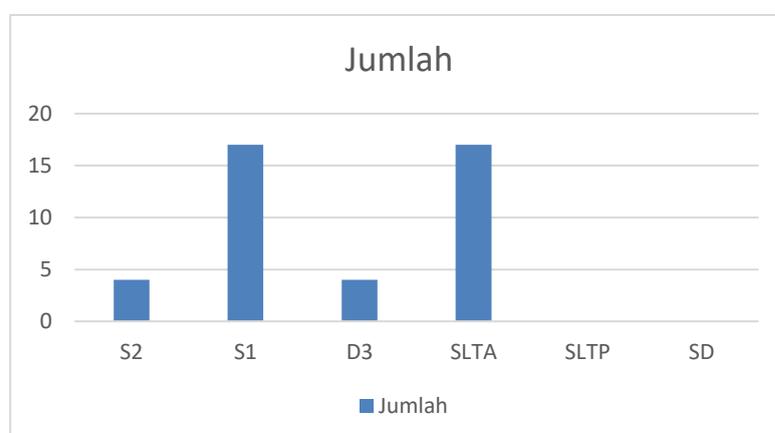
Berdasarkan ketersebaran jenis pendidikan PNS pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tingkat pendidikan SD 0 (nol) orang, SLTP 0 (nol) orang, SLTA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, D3 sebanyak 4 (empat) orang, S1 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, S2 sebanyak 4(empat) orang, keterangan tersebut akan ditampilkan pada tabel dibawah ini

Tabel 1.2
Sebaran PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	S2	4 Orang	10%
2	S1	17 Orang	40%
3	D3	4 Orang	10%
4	SLTA	17 Orang	40%
5	SLTP	0 Orang	0%
6	SD	0 Orang	0%
TOTAL		42 Orang	100%

Sesuai dengan keterangan tingkat pendidikan aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bahwa tingkat pendidikan berjumlah paling banyak yaitu pada SLTA dan S1 dengan persentase 40,5% S2 dan D3 sejumlah 9,5%. Dengan tingkat pendidikan yang dinilai mampu membawa OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pencapaian kinerja optimal. Berikut gambar diagram batang dalam persentase tingkat pendidikan dibawah ini

Grafik 1.1
Persentase Tingkat Pendidikan



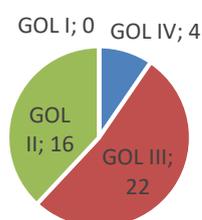
Sesuai dengan tingkat pendidikan SDM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kondisi tersebut dinilai cukup kompeten dalam pencapaian kinerja dan dapat meningkatnya kapasitas untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sesuai dengan tersedianya SDM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maka terdapat perbedaan jabatan menurut Golongan yaitu Golongan IV dengan jumlah 4 (empat) orang, Golongan III dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) orang, Golongan II dengan jumlah 10 (sepuluh) orang, Golongan I dengan jumlah 1 (satu) orang. Berikut tabel menurut golongan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dibawah ini:

Tabel 1.3
Sebaran PNS Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	GOL IV	4	10%
2	GOL III	22	52%
3	GOL II	16	38%
4	GOL I	0	0%
TOTAL		42	100%

Berdasarkan golongan dan telah diketahui persentase pada setiap golongan yaitu pada Golongan IV dengan jumlah persentase 10%, Golongan III dengan jumlah persentase 52%, Golongan II dengan jumlah persentase 38%, dan Golongan I dengan jumlah persentase 0%. Untuk kejelasan mengenai tingkat persentase akan dijelaskan pada gambar diagram dibawah ini

Grafik 1.2
Persentase PNS Berdasarkan Golongan



b. Aset yang dimiliki

Kepentingan sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai penunjang kegiatan. Berikut ini merupakan jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo hingga akhir 2021 yang terdiri dari:

Tabel 1.4

Kondisi Tanah dan Bangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

No	Tanah Bangunan	Lokasi	Luas (m ²)	Kondisi (%)	Keterangan
1.	Tanah Kantor	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Kabupaten Sidoarjo	3.887	Baik	Sertifikat
2.	Bangunan Kantor	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Kabupaten Sidoarjo	2.347	Baik	-

Kelayakan Gedung yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Gedung Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo dilakukan rehabilitasi berat gedung dengan anggaran sebesar 2,4 Miliar dan dilanjutkan kembali pelaksanaan rehabilitasi berat gedung pada tahun anggaran 2016 dengan nilai anggaran sebesar 7,4 Miliar sehingga tercapai target sebesar 100%,

Luas tanah 967 m² dan luas bangunan adalah 2.347 m², Pada tahun 2017 terjadi perubahan Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Koperasi dan Usaha mikro berpisah dengan Dinas Perindustrian, perdagangan dan ESDM tetapi menempati gedung yang sama sehingga Gedung tersebut dipakai untuk 2 (dua) dinas yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tanah dan bangunan merupakan modal penting dalam mewujudkan capaian kinerja kedepan. Penunjang kelayakan gedung juga diimbangi oleh kondisi kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan tabel dibawah ini

Tabel 1.5
Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas

No	Jenis	Merk	Tahun Kendaraan	Jumlah
Roda4				
1	Toyota	Kijang Innova	2010	1
2	Toyota	Avanza	2011	1
3	Nissan	Grand Livina	2014	1
4	Daihatsu	Terios	2012	1
5	Daihatsu	Terios	2012	1
6	Toyota	Kijang	2012	1
7	Toyota	Kijang Innova	2017	1
Jumlah				7
Roda 2				
1	Honda	Vario	2014	1
2	Honda	Supra X 125	2013	1
3	Honda	Supra X 125	2013	1
4	Honda	Supra X	2013	1
5	Suzuki	Sky Drive	2012	1
6	Suzuki	Sky Drive	2001	1
7	Yamaha	Jupiter	2014	1
8	Yamaha	Mio	2014	1
9	Yamaha	Mio	2014	1
10	Yamaha	Mio	2014	1
11	Yamaha	Jupiter	2012	1
12	Honda	Vario	2012	1
Jumlah				12

Alat Transportasi roda empat sebanyak 7 (tujuh) buah merupakan kepemilikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan jenis kendaraan yang berbagai macam, sedangkan untuk roda dua terdapat 12 (dua belas) jenis. Kondisi tabel diatas dengan keadaan baik dan layak pakai. Transportasi tersebut diharapkan dapat menunjang serta meningkatnya kinerja secara optimal.

Jumlah Kondisi Kendaraan yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga diimbangi oleh kondisi peralatan kantor yang ada sesuai dengan tabel dibawah ini: **Tabel 1.6** Kondisi Peralatan Kantor

No	Nama Barang	Jumlah		Satuan	Kondisi
Alat Kantor dan Rumah Tangga					
1	Lemari Arsip	15		Unit	Baik
2	Televisi LED	4		Unit	Baik
3	Komputer	10		Unit	Baik
4	Laptop	6		Unit	Baik
5	Printer	12		Unit	Baik
6	Kursi Rapat	107		Unit	Baik
7	Kulkas	2		Unit	Baik
8	Mesin Absensi	1		Unit	Baik
9	AC	16		Unit	Baik
10	Meja Kerja	17		Unit	Baik
11	LCD Proyektor	1		Unit	Baik
12	Jaringan Wireless	1		Paket	Baik
13	Kursi Sofa	4		Set	Baik
14	Jaringan Internet	1		Unit	Baik
15	Laterbox	1		Unit	Baik
16	Papan Struktur organisasi	1		Unit	Baik
17	Meja Kepala Dinas	1		Unit	Baik
18	Handycam	1		Unit	Baik
19	Mesin Ketik Manual	1		Unit	Baik
20	Kamera CCTV	8		Unit	Baik
21	Monitor CCTV	2		Unit	Baik
22	Kamera Digital	1		Unit	Baik
23	Sound Sistem	1		Paket	Baik

Secara keseluruhan kondisi peralatan kantor dengan kondisi baik tetapi masih belum mencukupi kebutuhan dalam menunjang aktivitas kinerja di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sehingga perlu adanya tambahan sarana dan prasarana untuk mendukung OPD dalam mencapai kinerjanya.

c. Isu Strategis Yang dihadapi

Dalam mengidentifikasi permasalahan melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dengan adanya tujuan untuk mencapai target kinerja. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

- a. Masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam rapat anggota tahunan
- b. Masa pandemi COVID-19 mengakibatkan terbatasnya pembinaan pada koperasi secara verbal atau tatap muka secara langsung
- c. Kurangnya SDM dalam tenaga koperasian dan usaha mikro yang berkompeten sesuai dengan klasifikasi yang sesuai dengan koperasi dan usaha mikro
- d. Database usaha mikro yang kurang update
- e. Rendahnya akuntabilitas dalam penyusunan keuangan bagi koperasi
- f. Terbatasnya fasilitas dan pendampingan koperasi dan usaha mikro karena luasnya wilayah Kabupaten Sidoarjo

Faktor eksternal yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut adanya kewenangan yang dapat dikendalikan oleh OPD atau faktor internal sebagai berikut:

- a. Himbuan sosial distancing mengakibatkan perbatasan kontak fisik selama COVID-19
- b. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro
- c. Rendahnya produktivitas usaha mikro
- d. Masih ditemukan koperasi yang belum menggunakan manajemen keuangan yang efektif dan efisien
- e. Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan akan semakin ketat serta perkembangan digitalisasi menyebabkan usaha mikro bergerak kepada media online

Sedangkan faktor internal yang menyebabkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum adanya sanksi untuk koperasi yang mengakibatkan tidak disiplinnya para kopersipada rapat anggota tahunan

- b. Kurangnya SDM yang ahli dalam bidang koperasi dan usaha mikro baik pembinaan maupun pengorganisasi pengelolaan koperasi yang berkualitas
- c. Regulasi perkoperasian yang belum konsisten sehingga kurangnya tanggung jawab atas penyusunan keuangan

Tabel 1.7

Isu Strategis

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kajian Renstra Kementerian koperasi dan usaha mikro: "Terwujudnya kinerja Koperasi dan UMKM dan kemampuan UMKM berdaya saing"	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah koperasi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.470 koperasi. b. Pertumbuhan koperasi yang berkualitas tahun 2020 tercapai sebesar 1,51% atau sebesar 511 koperasi. 	IKK	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya sanksi untuk koperasi yang mengakibatkan tidak disiplinnya para koperasi pada rapat anggota tahunan b. Kurangnya SDM yang ahlidalam bidang koperasi dan usaha mikro baik pembinaan maupun pengorganisasi pengelolaan koperasi yangberkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Himbauan sosial distancing mengakibatkan perbatasan kontak fisik selama COVID-19 b. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro c. Rendahnya produktivitas usaha mikro d. Masih ditemukan koperasi yang belum menggunakan manajemen keuangan yang efektif dan efisien e. Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan akan semakin ketat serta perkembangan digitalisasi menyebabkan usaha mikro bergerak kepada media online 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam rapat anggota tahunan b. Masa pandemi COVID-19 mengakibatkan terbatasnya pembinaan pada koperasi secara verbal atau tatap muka secara langsung c. Kurangnya SDM dalam tenaga koperasian dan usaha mikro yang berkompeten sesuai dengan klasifikasi yang sesuai dengan koperasi dan usaha mikro d. Database usaha mikro yang kurang update e. Rendahnya akuntabilitas dalam penyusunan keuangan bagi koperasi f. Terbatasnya fasilitas dan pendampingan koperasi dan usaha mikro karena luasnya wilayah Kabupaten Sidoarjo
Kajian Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur: "Peningkatan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan peningkatan jumlah, serta peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah"	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo sebesar 176.425 usaha mikro. b. Realisasi indeks pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2020 sebesar 0,25% atau sebesar 3.228 	IKK	<ul style="list-style-type: none"> c. Regulasi perkoperasian yang belum konsisten sehingga kurangnya tanggung jawab atas penyusunan keuangan 		

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

A. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021
dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Sidoarjo

Misi RPJMD Kab.Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab.Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab.Sidoarjo	Tujuan Renstras OPD	Sasaran Renstra OPD
Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Meningkatnya Pendapatan per Kapita Masyarakat	Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang mandiri	Meningkatnya Aktivitas ekonomi masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro
		Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat		

B. Matriks Rencana Strategis

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro : Meningkatkan Koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang mandiri

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Tujuan

NO	SASARAN STRATEGIS		DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					PROGRAM PENDUKUNG
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui	Persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas	(Jumlah Koperasi berkualitas tahun N-Jumlah		0,96%	1,14%	1,32%	1,50%	1,60%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

	koperasi dan usaha Mikro		Koperasi Tahun N-1/Jumlah Koperasi tahun N-1)100 %							Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
										Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
										Program Pemberdayaam dan Perlindungan Koperasi
			Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri	(Jumlah Usaha Mikro yang mandiri Tahun N- Jumlah Usaha Mikro Tahun N-1/jumlah Usaha Mikro Tahun N-1) x100%	0.15 %	0.17%	0.2%	0.22%	0.25%	Program Pemberdayaan Usaha M enengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)
									Program Pengembangan UMKM	

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS		Target 2021	PROGRAM		Target 2021	ANGGARAN (Rp)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro	Persentase Koperasi yang berkualitas	21,84 %	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	82,5%	186.752.395,00
				Program Penilaian KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	41,62%	138.825.146,00
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang terlatih	52,65%	904.153.394,00
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang direvitalisasi	3,01%	63.272.205,00

			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasa aparat perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80%	7.071.879.456,00
	Persentase Usaha Mikro yang mandiri	1,87 %	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	4,75%	1.011.035.171,00
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	1,64%	643.404.482,00

2.3.PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja ini merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara berjenjang mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu yaitu periode tahun 2021. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini adalah upaya dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perjanjian Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Miro Kabupaten Sidoarjo dengan Bapak Bupati, sebagai berikut:

Tabel 2.4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021
1	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro	Persentase Koperasi yang berkualitas	21,84%
		Persentase usaha mikro yang mandiri	1,87%

Tabel 2.5

No.	Program	Pagu Anggaran
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	186.752.395,00
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	138.825.146,00
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	904.153.394,00

4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	63.272.205,00
5	Program Pemberdayaan usaha Menengah, usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.011.0350171,00
6	Program Pengembangan UMKM	643.404.482,00
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.071.879.456,00
	Jumlah	10.019.322.249,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, fokus dari bukan hanya melaksanakan program kegiatan yang direncanakan, akan tetapi pembangunan berbasis kinerja berorientasi mendorong perbaikan dimana program/kegiatan, sumber daya dan anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampaknya.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, yang mana akuntabilitas menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi, Hasil pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Laporan Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya yang mencerminkan tugas pokok instansi tersebut, biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Penetapan indikator kinerja Utama pada saat merencanakan kinerja akan lebih

meningkatkan kualitas perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi yang merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan Usaha mikro diperoleh melalui pengukuran Indikator keluaran (output), sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian IKU

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021
	Persentase Koperasi yang berkualitas	21,84%	21,84%	100 %
	Persentase Usaha Mikro yang mandiri	1,87%	1,87%	100 %

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut ini adalah capaian kinerja organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo :

a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Pengukuran kinerja jangka menengah/tujuan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja tujuan di tahun 2021 dengan target dari indikator kinerja tujuan di tahun 2021, Berikut ini adalah capaian kinerja tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Menengah

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI DI TAHUN 2021	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya jumlah Koperasi berkualitas dan usaha mikro yang mandiri	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	1,60%	1,60%	100%
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang berkualitas	0,25%	0,25%	100%

b. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target:

Tabel 3.3

Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

NO	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi S.D Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian (%)
	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	1,60%	1,60%	100%
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri	0,25%	0,25%	100%

Capaian kinerja pada tahun 2021 berdasarkan indikator tujuan dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengembangan koperasi sebagai organisasi secara berkualitas akan berdampak pada kesejahteraan anggotanya dan kemanfaatan kepada masyarakat yaitu dapat meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat.

Adapun grafik pertumbuhan koperasi berkualitas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.1 Pertumbuhan Koperasi Berkualitas



Sumber : Dinas Koperasi dan UM

Sampai dengan tahun 2021, jumlah koperasi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.470 koperasi. Pada tahun 2021, indeks pertumbuhan koperasi berkualitas ditargetkan sebesar 1,60% setara tumbuh 20 koperasi berkualitas, untuk realisasi tercapai 100 % dari yang ditargetkan.

➤ **Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri**

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis Usaha Mikro mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong usaha mikro untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Usaha Mikro diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Adapun grafik pertumbuhan usaha mikro mandiri di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2 Pertumbuhan Usaha Mikro Mandiri



Sumber : Dinas Koperasi dan UM

Sampai dengan tahun 2021, jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sebesar 176.425 usaha mikro. Pada tahun 2021, indeks pertumbuhan usaha mikro mandiri ditargetkan sebesar 0,25% atau 3299 usaha mikro mandiri. Realisasi indeks persentase pertumbuhan usaha mikro mandiri di tahun 2021 tercapai sebesar 0.25% atau sebesar 3299 usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indeks persentase pertumbuhan usaha mikro tercapai sebesar 100%.

ii. Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4

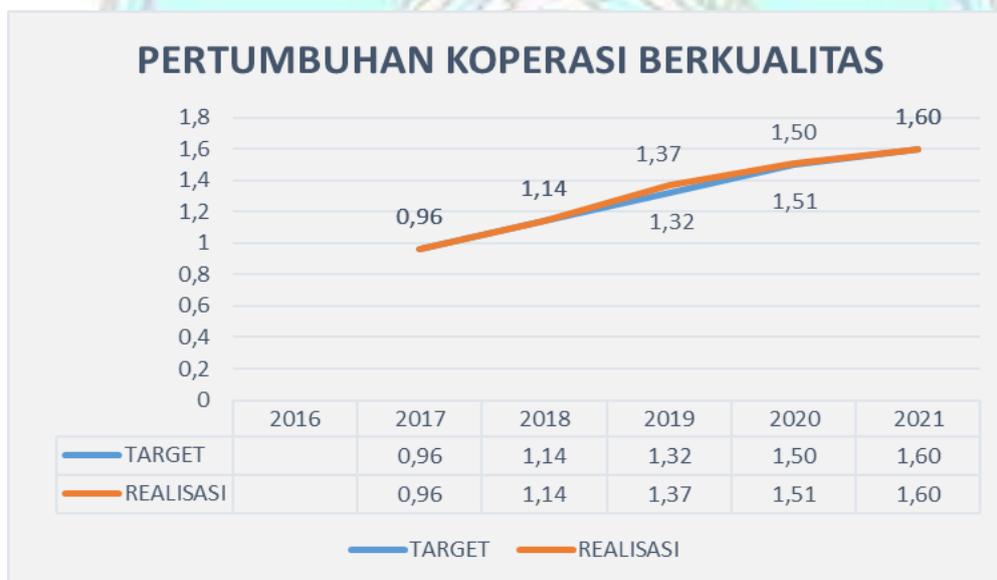
Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	NA	NA	NA	0,96%	0,96%	100%	1,14%	1,14%	100%	1,32%	1,37%	103%	1,50%	1,51%	100,97%	1,60%	1,60%	100%
Persentase Pertumbuhan usaha mikro yang mandiri	NA	NA	NA	0,96%	0,96%	100%	1,14%	1,14%	100%	0,20%	0,23%	115%	0,24%	0,25%	104%	0,25%	0,25%	100%

Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya tiap indikator dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

1. Persentase pertumbuhan Koperasi yang berkualitas

Grafik 3.3 Pertumbuhan Koperasi berkualitas

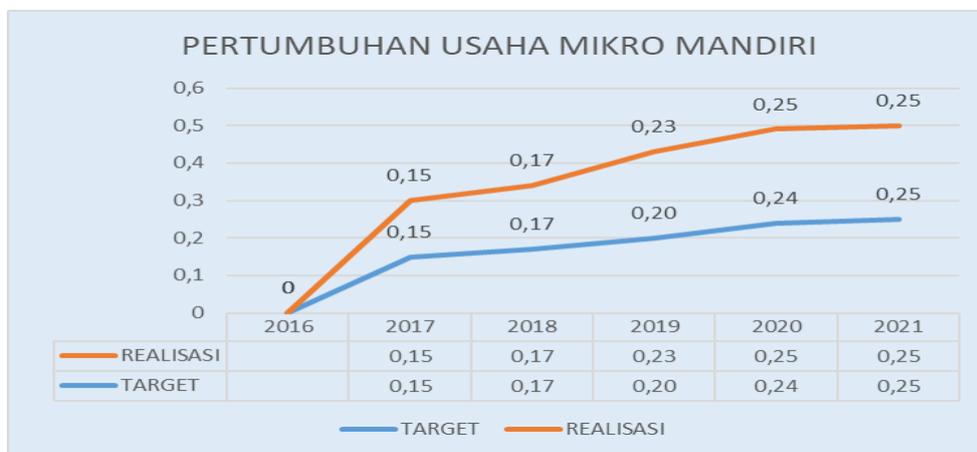


Sampai dengan tahun 2021, jumlah koperasi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.470 koperasi. Pada tahun 2021, indeks pertumbuhan koperasi berkualitas ditargetkan sebesar 1,60% atau 321 koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indeks persentase pertumbuhan koperasi tercapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, maka terjadi pertumbuhan koperasi berkualitas sebesar 20 koperasi yaitu yang semula di tahun 2020 1,51% atau 301 koperasi, pada tahun 2021 meningkat menjadi

1,60 % atau 321 koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi berkualitas di Kabupaten Sidoarjo tumbuh cukup baik.

2. Persentase Pertumbuhan usaha mikro yang mandiri

Grafik 3.4 Pertumbuhan Usaha Mikro Mandiri



Sumber : Dinas Koperasi dan UM

Sampai dengan tahun 2021, jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sebesar 176.425 usaha mikro. Pada tahun 2021, indeks pertumbuhan usaha mikro mandiri ditargetkan sebesar 0,25% atau 3.299 usaha mikro. Realisasi indeks persentase pertumbuhan usaha mikro mandiri di tahun 2021 tercapai sebesar 0,25% atau sebesar 3.299 usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indeks persentase pertumbuhan usaha mikro tercapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, maka ada pertumbuhan usaha mikro sebesar 212 usaha mikro yaitu yang semula di tahun 2020 terdapat 0,24% atau 3087 usaha mikro maka di tahun 2021 menjadi 0,25% atau 3299 usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo cukup baik.

iii. Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5

Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian (%)
	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	1,60%	1,60%	100%
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri	0,25%	0,25%	100%

Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah tiap indikator dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas

Grafik 3.5 Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas



Berdasarkan grafik diatas Realisasi tahun 2021, Persentase Pertumbuhan Koperasi berkualitas di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,60 % atau sebesar 321 koperasi dari 1470 koperasi. Jika dibandingkan dengan target 2021 sebesar 1,60 % atau 321 Koperasi maka kinerja tahun 2021 terrealisasi 100 % dari target 2021.

2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri

Grafik 3.6 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri



Sampai dengan tahun 2021, jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sebesar 176.425 usaha mikro. Pada tahun 2021, indeks pertumbuhan usaha mikro mandiri ditargetkan sebesar 0,24% atau 3.299 usaha mikro. Realisasi indeks persentase pertumbuhan usaha mikro mandiri di tahun 2020 tercapai sebesar 0,25% atau sebesar 3.228 usaha mikro. Jika dibandingkan dengan target di tahun 2021 sebesar 0,25 % atau sebesar 3299 usaha mikro maka tahun 2021 sudah terrealisasi 100% dari target tahun 2021.

iv. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian kinerja yaitu dengan mengukur tingkat keberhasilan kinerja

Tabel 3.8

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	% Capain	Kategori
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang mandiri	Persentase Pertumbuhan koperasi yang berkualitas	100%	Berhasil
		Persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri	100%	Berhasil

Keterangan :

NO	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan –permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya-upaya yang dilakukan serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya

➤ Tujuan Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang mandiri

1) Kendala /permasalahan yang dihadapi:

- Masih ada Koperasi yang tidak aktif
- Terdapat Koperasi yang tidak melaksanakan RAT karena pandemic covid 19
- Masa pandemic covid 19 mengakibatkan terbatsanya pembinaan pada koperasi secara verbal atau tatap muka secara langsung
- Terbatasnya SDM Perkoperasian yang berkompeten
- Sulitnya regenerasi pengurus Koperasi
- Masih terdapat Koperasi yang belum menggunakan manajemen keuangan yang efektif dan efisien
- Rendahnya produktivitas usaha mikro
- Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan semakin ketat
- Kurangnya SDM yang ahli dalam Usaha Mikro
- Banyak pelaku usaha mikro yang belum mengetahui keberadaan DITAKOPUM yang merupakan database dinkop melakukan pembinaan

2) Upaya yang telah dilakukan

- Inventarisasi Koperasi tidak aktif untuk selanjutnya dipetakan permasalahannya dan diadakan pembinaan.
- Edukasi pelaporan Koperasi dengan aplikasi DITAKOPUM
- Pembinaan melalui Daring
- Membagi tugas pembinaan perkoperasian dengan keterbatasan SDM
- Sosialisasi tentang Koperasi kepada Pelajar SLTA, Lomba Karya Tulis perkoperasian bagi Mahasiswa dan Pelajar SLTA
- Pembinaan dan pendampingan , Diklat Kepada Koperasi
- Pemberian pelatihan, pendampingan kepada Usaha Mikro
- Pemasaran melalui Daring maupun offline
- Sosialisasi kepada pelaku usaha mikro tentang keberadaan DITAKOPUM

3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya:

- Melakukan pembinaan dan pelatihan perkoperasian kepada pengurus/pengelola koperasi baik secara daring/luring
- Memfasilitasi adanya peluang usaha koperasi dan usaha mikro melalui kemitraan dan promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Melakukan sosialisasi dan pembinaan tatap muka dengan jumlah dan frekuensi terbatas namun tetap memperhatikan protokol Kesehatan secara ketat

4) Simpulan atas pencapaian kinerja

Program telah dilaksanakan dengan baik , namun pendampingan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi dan usaha mikro lebih ditingkatkan.

Solusi dan upaya perbaikan ditahun mendatang

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang antara

lain:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus maupun pengelola koperasi baik secara online maupun offline.
2. Peningkatan kinerja usaha koperasi melalui pelatihan manajemen usaha koperasi, melaksanakan penilaian kesehatan koperasi, pemeringkatan Koperasi;
3. Pendampingan kepada koperasi yang tidak aktif dan bermasalah;
4. Peningkatan fasilitasi promosi melalui offline (Pameran) maupun online (E Tuko)
5. Peningkatan pelatihan pendampingan dan bimtek usaha mikro dan tetap melaksanakan program sedekah ilmu
6. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro

c. Pengukuran Kinerja Tahunan

Pengukuran kinerja tahunan/sasaran tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja sasaran di tahun 2021, dengan target dari indikator kinerja sasaran ditahun 2021 sebagaimana pada Renstra

Tabel 3.9

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya Aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro	Persentase Koperasi yang berkualitas	21,84%	21,84%	100%
		Persentase Usaha Mikro yang mandiri	1,87%	1,87%	100%

Analisis pencapaian Kinerja Tahunan

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

Tabel 3.10

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	21,84%	21,84%	100%
	Persentase Usaha Mikro yang mandiri	1,87%	1,87%	100%

Grafik 3.7



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 100% dari target

Adapun tiap indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Koperasi yang berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Parameter yang menjadi dasar koperasi berkualitas adalah apabila memenuhi 5 (lima) aspek yang terdiri dari :

- 1) Aspek Kelembagaan Koperasi, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
- 2) Aspek Usaha Koperasi, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi dalam hal rasa tanggungrenteng atau kemauan untuk berbagi resiko (*risk sharing*), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan.
- 3) Aspek Keuangan Koperasi, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya seperti ipersentase pelunasan simpanan wajib dan prosentase sebesar simpanan sukarela.
- 4) Aspek Manfaat Koperasi terhadap Anggota, ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
- 5) Aspek Manfaat Koperasi terhadap Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Grafik 3.8. Persentase Koperasi yang berkualitas



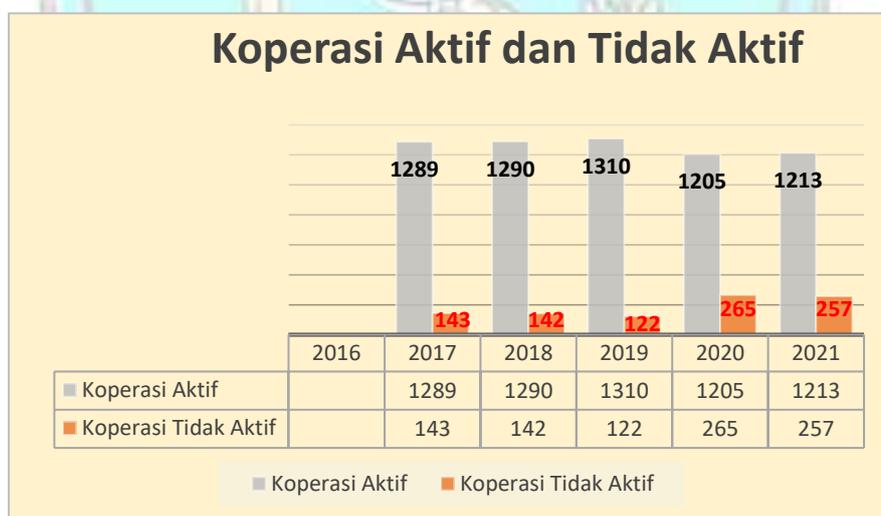
Target yang ditetapkan ditahun 2021 untuk indeks Presentase Koperasi yang Berkualitas adalah 21,84% atau sebesar 321 Koperasi dari 1.470 Koperasi. Realisasi tahun 2021 tercapai 21,84% atau 321 Koperasi, maka persentase koperasi yang berkualitas telah tercapai 100%.

Secara garis besar Indeks koperasi berkualitas dapat dijabarkan dalam 2 (dua) indikator yaitu :

1) Koperasi Aktif

Koperasi yang aktif tentunya dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut -turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah seperti memiliki nomer induk koperasi (NIK), Surat Keputusan Anggaran Dasar oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Koperasi aktif mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek badan usaha aktif. Adapun perkembangan koperasi aktif selama lima tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9 .Koperasi Aktif dan Tidak Aktif



Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Pada tahun 2021 terjadi penambahan jumlah koperasi aktif yaitu sebesar 8 koperasi. Pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif sebesar 1205 koperasi sedangkan tahun 2021 jumlah koperasi aktif menjadi 1.213 koperasi.

2) Koperasi Sehat

Koperasi sehat adalah suatu kondisi koperasi yang usahanya memenuhi tujuh aspek penilaian kesehatan yaitu : Permodalan, Kualitas Aktiva produktif, Manajemen Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan, Jati diri Koperasi.

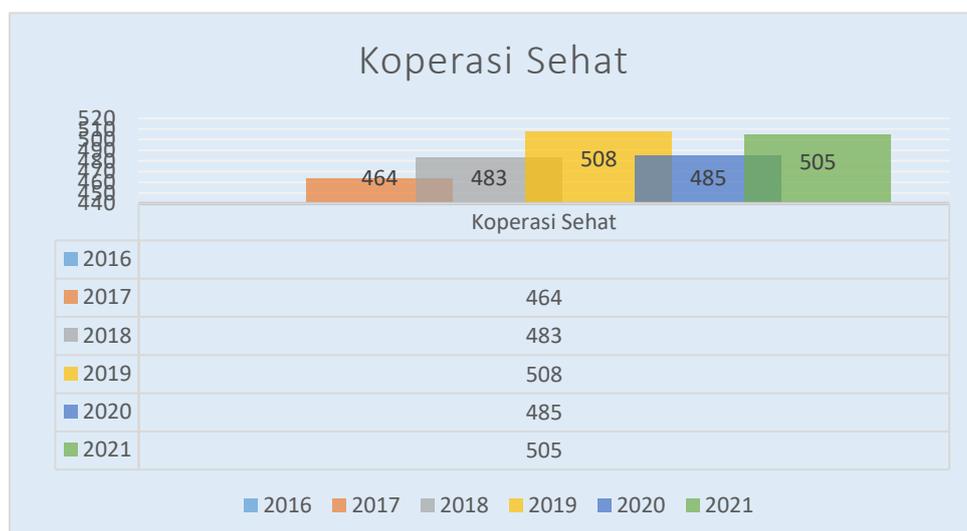
Berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi maka koperasi wajib dinilai kesehatannya setiap tahunnya. Adapun penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

1. Permodalan
2. Kualitas Aktiva Produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Jatidiri Koperasi

Koperasi sehat mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek usaha koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Perkembangan jumlah koperasi sehat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.10. Koperasi Sehat



Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2. Persentase Usaha Mikro yang Mandiri

Usaha Mikro Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

Adapun grafik antara capaian kinerja dengan target tahun 2021 sebagai berikut :

Grafik.3.11 Persentase Usaha Mikro yang mandiri



Jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2021 sebanyak 176.425 usaha mikro. Realisasi Presentase Usaha Mikro yang mandiri tahun 2021 tercapai sebesar 1,87% atau 3.299 usaha mikro dari target yang ditetapkan 1,87% atau 3.299 usaha mikro ,maka capaian kinerja tahun 2021 telah tercapai sebesar 100%.

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya perindikator:

Tabel 3.11

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Presentase Koperasi yang berkualitas	NA	NA	NA	16,48%	16,48%	100%	18,15%	18,15%	100%	19,83%	20,31%	102%	20,50%	20,70%	100,97%	21,84%	21,84%	100%
Persentase Usaha mikro yang mandiri	NA	NA	NA	0,50%	0,50%	100%	1,25%	1,25%	100%	1,50%	1,53%	102%	1,75%	1,83%	105%	1,87%	1,87%	100%

1. Persentase Koperasi yang berkualitas

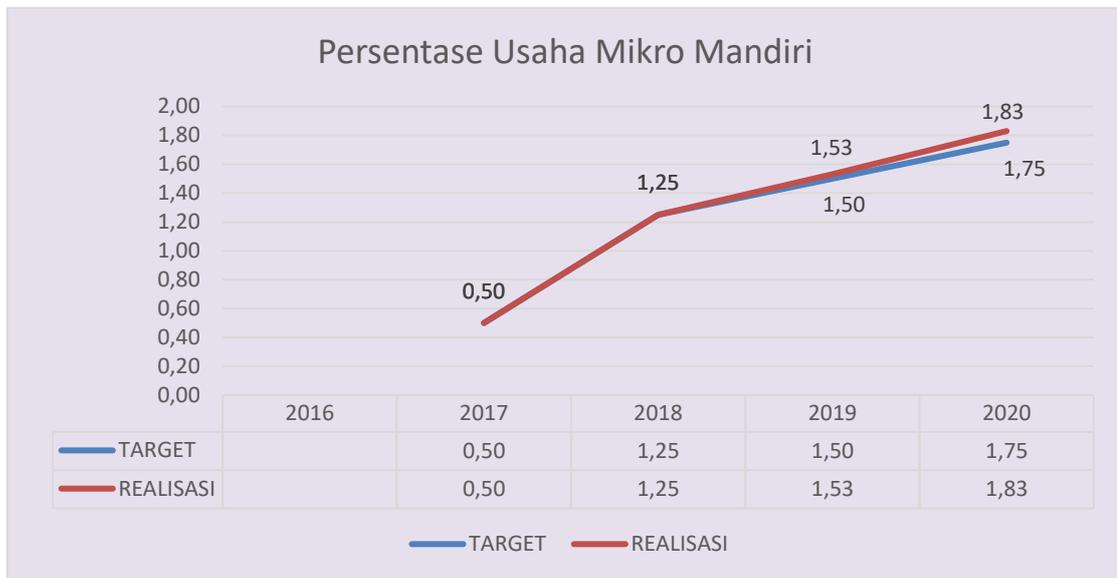
Grafik.3.12 Persentase Koperasi yang berkualitas



Target yang ditetapkan ditahun 2021 untuk indeks Presentase Koperasi yang Berkualitas adalah 21,84% atau sebesar 321 Koperasi dari 1.470 Koperasi. Realisasi tahun 2021 tercapai 21,84% atau 321 Koperasi, maka persentase koperasi yang berkualitas telah tercapai 100% dari target. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka koperasi berkualitas tercapai sebesar 21,84% atau 321 koperasi, sehingga ada peningkatan koperasi berkualitas sebesar 8 Koperasi.

2. Persentase Usaha Mikro yang mandiri

Grafik.3.13. Persentase Usaha Mikro yang Mandiri



Sumber : Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2021 sebanyak 176.425 usaha mikro. Realisasi Presentase Usaha Mikro yang mandiri tahun 2021 tercapai sebesar 1,83% atau 3.299 usaha mikro dari target yang ditetapkan 1,83% atau 3.299 usaha mikro maka capaian kinerja tahun 2021 telah tercapai sebesar 100%.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.12

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian (%)
	Persentase Koperasi yang berkualitas	21,84	21,84%	100%
	Persentase Usaha Mikro yang mandiri	1,87%	1,87%	100%

1. Persentase Koperasi yang berkualitas

Grafik.3.13.

Perbandingan koperasi yang berkualitas antara capaian kinerja dengan target jangka menengah



Berdasarkan grafik diatas Realisasi tahun 2021, Persentase Koperasi berkualitas di Kabupaten Sidoarjo sebesar 21,84% atau sebesar 321 koperasi dari 1470 koperasi dan dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 100% dari target jangka menengah.

2. Persentase Usaha Mikro yang mandiri

Grafik 3.14.

Perbandingan usaha mikro yang berkualitas antara capaian kinerja dengan target jangka menengah



Jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2021 sebanyak 176.425 usaha mikro. Realisasi Presentase Usaha Mikro yang mandiri tahun 2021 tercapai sebesar 1,87% atau 3.299 usaha mikro dari target yang ditetapkan 1,87% atau 3.299 usaha mikro maka capaian kinerja tahun 2021 telah tercapai sebesar 100%, dan dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah

mencapai 100 % dari target jangka menengah.

vi. Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Analisis Keberhasilan dan kegagalan

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian kinerja yaitu dengan mengukur tingkat keberhasilan kinerja

a) Pengukuran keberhasilan Kinerja Jangka Menengah OPD

Tabel 3.15

No	Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian	Kategori
	Meningkatkan Aktivitas ekonomi Masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi berkualitas	100%	Berhasil
		Persentase usaha mikro yang mandiri	100%	Berhasil

Keterangan:

No	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100 %	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja beserta upaya-upaya yang dilakukan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya

➤ **SASARAN** : Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi

1. Masih terdapat koperasi yang tidak aktif dan belum dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai waktu yang ditentukan;
2. Belum ada sinkronisasi Data Koperasi antara Aplikasi DITAKOPUM dan Online Data

System (ODS).

3. Terjadinya pandemik Covid 19 berakibat menurunnya pendapatan anggota koperasi sehingga daya beli dan pemenuhan kewajiban anggota membuat volume usaha menurun sehingga mempengaruhi pendapatan koperasi;
 4. Bertambahnya Koperasi tidak Aktif.
 5. Banyak usaha mikro yang terkendala masalah pemasaran dan permodalan akibat pandemic covid 19;
 6. Banyaknya usaha mikro yang masih belum menguasai teknologi ketika mengikuti pelatihan online yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UM.
 7. Adanya pandemi covid sehingga pendampingan kurang optimal;
 8. Banyak Pelaku usaha mikro yang terkendala pemasaran dan permodalan karena pandemic covid;
 9. Tidak tercapainya target penyaluran dana bergulir karena pelaku usaha mikro banyak yang mempunyai kredit macet di bank lain sehingga tidak lolos BI Checking selain itu juga lamanya waktu pencairan dana bergulir.
- 2) Upaya – upaya yang telah dilakukan
1. Melakukan perubahan teknis pelaksanaan pembinaan yang semula lebih banyak secara langsung, saat ini mengarah dengan online/webinar; melalui kanal *youtube* Klinik Koperasi dan Usaha Mikro;
 2. Menginventarisir koperasi yang tidak aktif untuk selanjutnya dilakukan pendampingan dan pembinaan;
 3. Melaksanakan penyuluhan perkoperasian
 4. Meningkatkan SDM pengelola data Koperasi agar melaksanakan updating data di DITAKOPUM maupun ODS sehingga data valid;
 5. Mengadakan Bimtek/Pelatihan bagi Pengurus Koperasi, pengawas koperasi serta anggota koperasi antara lain Bimtek Penguatan Kelembagaan, Diklat Manajemen

Koperasi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan secara Elektronik, Peningkatan SDM Koperasi;

6. Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian, peraturan perundang-undangan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke Koperasi;
8. Melaksanakan Penilaian Kesehatan Koperasi
9. Pembinaan secara tatap muka dilakukan dengan bertahap dengan mematuhi protokol kesehatan penanggulangan Covid 19;
10. Memfasilitasi adanya peluang usaha bagi pelaku usaha mikro melalui kemitraan dan promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
11. Memfasilitasi melakukan pemasaran secara online (e-Tukuo) dan bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan pameran virtual;
12. Peralihan program dana bergulir yang penyalurannya melalui Bank Jatim menjadi Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) yang penyalurannya melalui Bank Delta Artha.
13. Adanya pembinaan secara online Melaksanakan Sosialisasi Wira Usaha Baru;
14. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan bagi pelaku usaha mikro
15. Melaksanakan kegiatan sedekah ilmu dari dan untuk pelaku usaha mikro, saling berbagi ilmu dan ketrampilan sehingga SDM pelaku usaha mikro bertambah;

3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya

- Peningkatan Pelatihan, pendampingan, penyuluhan bimbingan dan advokasi koperasi
- Peningkatan fasilitasi promosi melalui offline (Pameran) maupun online (E Tukuo)
- Peningkatan pelatihan pendampingan dan bimtek usaha mikro dan tetap melaksanakan program sedekah ilmu
- Pencetakan wira usaha baru sesuai passion nya
- Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan usaha mikro

4) Simpulan atas pencapaian kinerja:

Sampai dengan tahun 2021 kinerja dinas Koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi yang berkualitas dengan Persentase Koperasi yang berkualitas mencapai 100% di tahun 2021, sedangkan persentase usaha mikro yang mandiri mencapai 100% di tahun 2021 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dinas koperasi dan usaha mikro berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro.

b. Solusi dan upaya Perbaikan di tahun mendatang

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang antara lain :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus maupun pengelola koperasi baik secara online maupun offline
2. Peningkatan kinerja usaha koperasi melalui pelatihan manajemen usaha koperasi, melaksanakan penilaian kesehatan koperasi, pemeringkatan Koperasi;
3. Pendampingan kepada koperasi yang tidak aktif dan bermasalah;
4. Penyediaan klinik konsultasi koperasi dan usaha mikro;
5. Monitoring dan evaluasi koperasi
6. Peningkatan fasilitasi promosi melalui offline (Pameran) maupun online (E Tuko)
7. Peningkatan pelatihan pendampingan dan bimtek usaha mikro dan tetap melaksanakan program sedekah ilmu
8. Pencetakan wira usaha baru sesuai passion nya
9. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro

3.4. Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung

Program dan Kegiatan merupakan alat/sarana utama dalam mencapai tujuan dan sasaran karena melalui program dan kegiatan tersedia pendanaan seperti dalam DPA yang telah ditetapkan.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaksana dari Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dengan hasil capaian kinerja sebagai berikut

Tabel 3.16

No.	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentasi koperasi aktif	82,50%	82,50%	100%	Berhasil
		Persentase koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi	27,70%	27,70%	100%	Berhasil
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	41,62%	41,62%	100%	Berhasil
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang di diklat	52,28%	52,28%	100%	Berhasil
		Persentase SDM/Pengelola koperasi bersertifikat SKKNI	19,31%	19,31%	100%	Berhasil
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang direvitalisasi	3,01%	3,01%	100%	Berhasil
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	4,75%	4,75%	100%	Berhasil
		Persentase Usaha Mikro yang memiliki derajat kepatuhan Usaha Mikro	48,17%	48,17%	100%	Berhasil
6	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas	1,64%	1,64%	100%	Berhasil

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Masing – masing Program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan yaitu antara lain :

Tabel 3.17

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif	8 koperasi	8 koperasi
2	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	150 koperasi	150 koperasi
3	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM/Pengelola Koperasi yang Bersertifikat SKKNI	135 orang	135 orang
4	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Kemitraannya	100 UM	100 UM
5	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang memiliki legalitas usaha	100 UM	100 UM
6	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang Mendapat Sertifikasi SKKNI	35 UM	35 UM

		Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pengembangan Produksi dan Pemasarannya	300 UM	300 UM
--	--	---	--------	--------

Program Prioritas Bupati

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro diamanatkan untuk melaksanakan 4 (empat) Program Prioritas Bupati dari 17 (tujuh belas) Program Prioritas Bupati yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Rp. 5 Juta – Rp. 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan

Tabel 3.18

1 Rp. 5 JUTA – Rp. 50 JUTA MODAL USAHA MIKRO PEREMPUAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT
	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Raperbup Tentang Pedoman Pemberdayaan Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan

Program Prioritas Rp. 5 Juta – Rp. 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan lebih dikenal dengan KURMA (Kartu Usaha Perempuan Mandiri). KURMA bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha perempuan mandiri dengan memberikan penghargaan berupa permodalan kepada kelompok usaha perempuan mandiri berbasis tingkat RT antara 5 juta s/d 50 juta. Program ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rentan sebagai akibat adanya pandemi covid-19. Dengan pemberdayaan ekonomi melalui usaha bersama dapat memberikan dan meningkatkan penghasilan masyarakat secara lebih luas dan merata.

Untuk optimalisasi Program Prioritas tersebut, pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro melaksanakan *forum group discussion* bantuan KURMA. Adapun output program prioritas tersebut berupa Raperbup Tentang Pedoman Pemberdayaan Usaha Perempuan Mandiri Melalui Pemberian Penghargaan.

2. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi

Tabel 3.19

2	2.000 WARUNG RAKYAT DIRENOVASI			
	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT
	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pengembangan Usaha Mikro	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Raperbup Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung

Program Prioritas Warung Rakyat Direnovasi diarahkan dalam upaya merenovasi warung-warung makanan dan minuman yang tersebar pada tingkat desa. Diharapkan dengan adanya renovasi warung rakyat ini disamping meningkatkan kualitas fisik/bangunan warung melalui pengecatan, perbaikan lantai, dinding dan atap, diharapkan juga dapat meningkatkan penjualan warung yang berdampak pada penghasilan pemilik warung serta memberikan kesan warung yang lebih indah, bersih dan nyaman. Untuk optimalisasi Program Prioritas tersebut, pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan *forum group discussion* warung rakyat direnovasi. Adapun output program prioritas tersebut berupa Raperbup Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung.

3. 20.000 UMKM Naik Kelas

Tabel 3.20

3	20.000 UMKM NAIK KELAS			
	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT
	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pengembangan Usaha Mikro	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Raperbup Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendorong pelaku usaha mikro bisa naik kelas dengan bertransformasi dari usaha informal menjadi formal, bertransformasi memasuki era digital dan memasuki pasar lokal/regional/nasional/global). Kriteria UMKM Naik Kelas antara lain :

1. Memiliki aspek legalitas usaha
2. UM Memproduksi dan memasarkan dengan berbasis teknologi
3. UM yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai fokus usahanya (Sertifikasi SKKNI)

Untuk optimalisasi Program Prioritas tersebut, pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain melaksanakan :

- Pelatihan Bisnis Online
- Pelatihan Packaging
- Workshop Digital Marketing
- SKKNI Penjamah Makanan

Adapun output program prioritas tersebut ada 100 UM yang Naik Kelas.

4. Reformasi Perizinan Untuk Bisnis Yang Kondusif

Tabel 3.21

4	REFORMASI PERIZINAN UNTUK BISNIS KONDUSIF			
	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT
	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100 UM

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro kecil secara sederhana. Manfaat dari dikeluarkannya izin tersebut adalah legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dan pemberdayaan dari pemerintah. Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah memfasilitasi 100 UM dalam hal perizinan usaha melalui kegiatan :

- Sosialisasi PIRT
- Sosialisasi Ijin Merk
- Sosialisasi BPOM Halal
- Sosialisasi Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS
- Sosialisasi Perjanjian Usaha Sehat

3.5. Laporan Realisasi Anggaran

Tingkat serapan anggaran atas program yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pemangku Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2021, dari 6 (enam) program semuanya diatas 85% dengan Pagu Indikatif Pendanaan (Anggaran) serta realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	904.153.394	865.948.400	95,77
2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	63.272.205	59.657.900	94,29
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	186.752.395	184.329.900	98,70
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	138.825.146	138.624.400	99,86
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.011.035.171	897.897.350	88,81
6	Program Pengembangan UMKM	643.404.482	632.000.500	98,23

3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.23

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro	Persentase Koperasi yang berkualitas	21,84%	21,84%	100%	1.293.003.140	1.248.560.600	96,56%
	Persentase Usaha Mikro yang mandiri	1,87%	1,87%	100%	1.654.439.653	1.529.897.850	92,47 %

3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.24

1. Efektivitas dan Efisiensi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan usaha mikro yang mandiri	Persentase Koperasi yang berkualitas	100%	96,56	3,44%
	Persentase Usaha Mikro yang mandiri	100%	92,47%	7,53%

Catatan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja-% Penyerapan Anggaran

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut dapat disampaikan bahwa terdapat 9 indikator kinerja yang efektif tercapai 100% dan 9 indikator kinerja tersebut efisien dalam penggunaan anggaran hal ini disebabkan oleh :

Efisiensi tersebut disebabkan oleh:

- a) Telah tersusunnya perencanaan kegiatan secara matang baik dari segi output, waktu pelaksanaan kegiatan maupun realisasinya dengan lebih memperhatikan hal-hal yang dapat berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran;
- b) Mempedomani rencana kegiatan yang telah dibuat;
- c) Memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo kepada publik.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 dengan kualitas pelaksanaan baik, sehingga tetap perlu menjaga kinerja untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu meningkatnya kualitas Koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha mikro Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, Februari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KAB. SIDOARJO



MOHAMAD EDI KURNIADI, ST.MM

Pembina Tk.I

NIP.196906051994031006

LAMPIRAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2021

